

TUGAS AKHIR

PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN

KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006

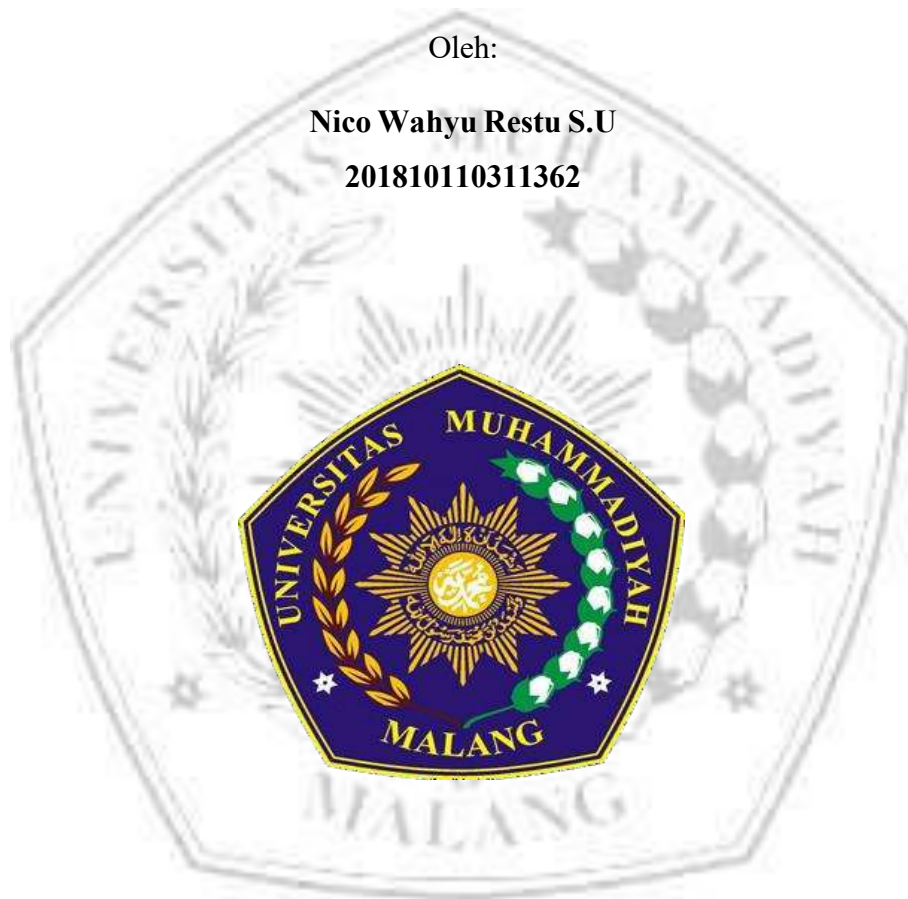
TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN

(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Oleh:

Nico Wahyu Restu S.U

201810110311362



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

TUGAS AKHIR
PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN
KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo

201810110311362



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN
KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN (STUDI
DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)**

Diajukan Oleh:


NICO WAHYU RESTU SATRIA UTOMO

201810110311362


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,

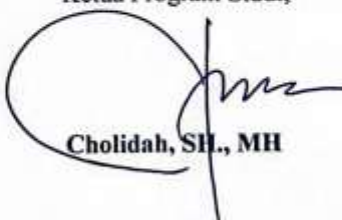

Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Said Noor Prasetyo, SH, MH


Dekan,

Prof. Dr. Tunggal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NICO WAHYU RESTU SATRIA UTOMO

NIM : 201810110311362

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nico Wahyu Restu Satria Utomo

ABSTRAK

Nama : Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo
NIM : 201810110311362
Judul : Penegakan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Kewajiban Tempat Usaha Pemdokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Rumah Usaha Pemdokan (Studi Wilayah Hukum Kota Malang)
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum
2. Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 8 Tentang Kewajiban Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemdokan. Di wilayah Hukum Kota Malang masih banyak Penyelenggara Usaha Pemdokan yang tidak memiliki izin maupun melanggar aturan yang tertulis di Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 8 terutama pada pemdokan yang campur pria dan wanita yang bersifat Non Pasutri atau belum menikah. Sehingga, penelitian ini akan membahas Bagaimana bentuk Pelanggaran Izin Usaha Pemdokan Di Wilayah Hukum Kota Malang, serta Bagaimana Penegakan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Kewajiban Usaha Pemdokan Di Wilayah Hukum Kota Malang. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan studi lapangan. Dari data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisa dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 8 Tentang Pelanggaran Kewajiban Penyelenggara Usaha Pemdokan masih belum efektif, hal ini dikarenakan banyaknya pemilik usaha pemdokan yang melanggar kewajiban berikut pelanggarannya seperti, penyelenggara tidak memiliki izin menyelenggarakan usaha pemdokan, tidak mentaati kewajiban yang sudah tertulis di Peraturan Daerah Nomor 6 Pasal 8 Kota Malang seperti tidak memiliki ruang tamu untuk menerima tamu lawan jenis dan juga jumlah minimal kamar yang ada di pemdokan tersebut, selanjutnya membahas tentang hambatan dalam penegakan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang yaitu Kewajiban, berikut pelanggarannya seperti, kurangnya informasi yang masuk pada instansi yang menindak pelanggar kewajiban usaha pemdokan lalu juga banyaknya warga yang tinggal di sekitar usaha pemdokan tersebut yang lebih memilih tutup mulut dan tidak melaporkannya pada instansi yang menindak pelanggaran usaha pemdokan tersebut.

Kata Kunci ; Penegakan Hukum, Sanksi Administrasi, Pelanggaran Kewajiban, Usaha Pemdokan

ABSTRACT

Name : Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo
NIM : 201810110311362
Title : *Enforcement of Administrative Sanctions for Violations of the Obligations of Lodging Business Places Based on Malang City Regional Regulation No. 6 of 2006 concerning Lodging Business House Organizers (Study of the Legal Area of Malang City)*
Adviser : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum
2. Said Noor Prasetyo, SH, MH

This research focuses on knowing and explaining how the effectiveness of the implementation of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2006 Article 8 concerning the Obligation to Organize a Lodging Business House. In the jurisdiction of Malang City there are still many Lodging Business Organizers who do not have permits or violate the rules written in Malang City Regional Regulation Number 6 of 2006 Article 8, especially in lodging that mixes men and women who are Non-Partners or unmarried. Thus, this research will discuss how the form of Violation of the Lodging Business License in the Legal Area of Malang City, as well as how the Enforcement of Administrative Sanctions for Violations of Lodging Business Obligations in the Legal Area of Malang City. The legal research method used is juridical sociologis with primary data collection techniques and secondary data. The data collection techniques used are interviews, documentation, and field studies. The data that has been collected is then analyzed and presented using qualitative descriptive methods. Based on the results of research conducted by researchers, the application of Regional Regulation Number 6 of 2006 Article 8 concerning Violations of the Obligations of Lodging Business Organizers is still not effective, this is because many lodging business owners violate the following obligations and violations such as, the organizer does not have a license to organize a lodging business, does not comply with the obligations that have been written in the Regional Regulation.

Keywords; Law Enforcement, Administrative Sanctions, Violation of Obligations, Lodging Businesses

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Penegakan Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Kewajiban Tempat Usaha Pemandokan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Rumah Usaha Pemandokan (Studi di Wilayah Hukum Kota Malang)"* ini dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

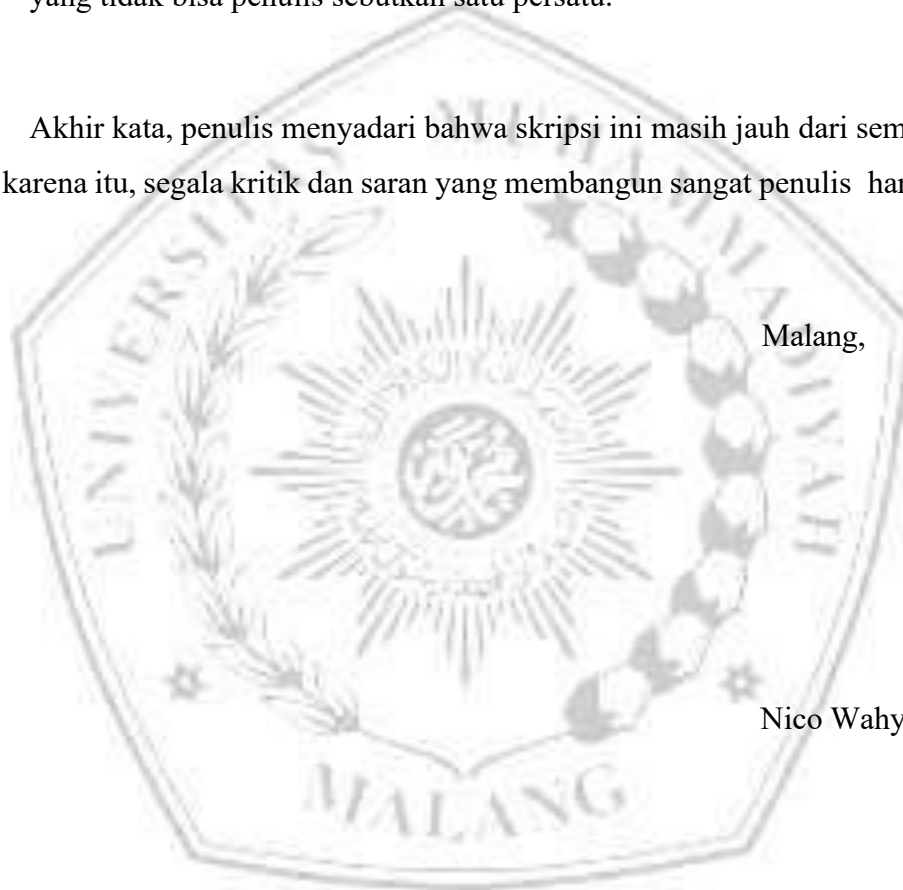
1. Kedua Orang Tua Kandung yang sangat penulis cintai dan sayangi, dan senantiasa mengirimkan doa dan memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sutarto dan Ibu Eni Erawati. Berkat dukungan dan doa mereka pula penulis bisa sampai kepada tahap ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
4. Cholidah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
5. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan serta sarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Segenap Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya selama

penulis duduk di perkuliahan dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Wahyudi Kurniawan. S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam kuliah.
8. Bapak Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang yang telah memberikan izin dan dukungan selama penulis melakukan penelitian.
9. Kawan-kawan seperjuangan Penulis Mahasiswa Hukum angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.



Malang, 2025

Penulis

Nico Wahyu Restu S.U

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PUSTAKA.....	xi
SERTIFIKAT PLAGIASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Teknik Pengumpulan Data.....	15
H. Analisis Data.....	15
I. Sistematika Penulisan	16
2. BAB II: Tinjauan Pustaka.....	16
3. BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	16
4. BAB IV: Penutup.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	17
2. Bentuk Penegakan Hukum Usaha Pemandokan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	22
1. Pengertian Perizinan	22
2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan.....	23
3. Jenis-Jenis Perizinan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administrasi.....	26

BAB III	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Bentuk Pelanggaran Pendirian Rumah Usaha Pemandokan di Wilayah Hukum Kota Malang.....	29
1. Bentuk Pelanggaran Rumah Usaha Pemandokan.....	29
2. Penegakan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Kewajiban Rumah Usaha Pemandokan di Wilayah Hukum Kota Malang.....	34
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	47
Lampiran 1 Surat Tugas:	47
Lampiran 2 Kartu Kendali.....	48
Lampiran 3 Bebas Plagiasi.....	49



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Agung Satrio Waryan dan Indra Safri. Analisa Pelayanan Perizinan kewajiban pemilik usaha pemondokan

Albar Prasty Nugraha dan Hananto Widodo ,NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 3, Juli 2020

Arvin William Wiryawinata, Jurnal Mengenal tujuan dan fungsi kewajiban penyelenggara usaha pemondokan

Barda Nawawi Arief. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42

Hasaziduhu Moho, *PENEGAKAN Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59

Implementasi Kebijakan mengenai usaha pemondokan (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan).

Ni Luh Putu Hemawati dan Ibrahim R. Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Kewajiban Usaha Pemondokan Di Kota Denpasar. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ridwan Andi Setiawan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Kewajiban Usaha Pemondokan.

Kebijakan Pemberlakuan Izin Usaha Pemondokan dan Permasalahannya Hananto Widodo Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Sanyoto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008

Septiyan Dwiky Wardana, Afifuddin, Suyeno. Responabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pelanggaran Kewajiban Usaha Pemondokan,

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Buku

Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.

Satjipto Rahardjo, SOSIOLOGI HUKUM, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.199.

Mahfud dan Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Liberty, Yogyakarta:1987), Hal. 27.

Rosady Ruslan,Aspek-Aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations Kehumasan, Jakarta, hlm. 86.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nico Wahyu Restu Satriyo Utomo

Nim : 201810110311362

Dengan Judul Skripsi :

" PENEKAKKAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN TEMPAT USAHA PEMONDOKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARA RUMAH USAHA PEMONDOKAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum